





Pangeran Adipati Anom dengan nama Raden Mas Damar dan bergelar Pangeran Riya.

Hubungan Pangeran Mangkunegara dengan adiknya yaitu Paku Buwono II dimasa-masa awal pemerintahannya cukuplah baik sebagai seorang adik dan kakak. Sikap hormat ditunjukkan oleh Paku Buwono II kepada kakandanya dengan selalu mengikutsertakannya dalam menentukan kebijaksanaan yang akan diambilnya untuk kehidupan di keraton. Namun kedekatan adik kakak tersebut kurang disukai oleh Patih Danureja dan pengikutnya, sehingga sering kali terjadi usaha-usaha dengan niat untuk memisahkan dan merenggangkan hubungan kedekatan adik kakak tersebut. Hal ini disebabkan adanya kekhawatiran akan ancaman kedudukan Patih Danureja dan adanya ambisi Pangeran Mangkunegara untuk menjadi raja. Hingga akhirnya timbullah fitnah kedekatan antara Pangeran Mangkunegara dengan seorang selir Paku Buwono II yang bernama Mas Ayu Larasati dan fitnah tersebut akhirnya membuat Paku Buwono II murka terhadap Pangeran Mangkunegara dan atas usul dari Patih danureja, Paku Buwono II memerintahkan penangkapan terhadap Pangeran Mangkunegara beserta seluruh harta dan putera-puteranya. Atas perintah Paku Buwono II, Pangeran Mangkunegara diasingkan ke Tanjung Harapan dan diizinkan untuk membawa dua orang selirnya, dua orang abdi dalem dan seorang puteranya. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 31 Januari 1728. Oleh para bangsawan dan masyarakat lainnya kurang menyetujui atas tindakan yang dilakukan oleh Paku Buwono II terhadap kakak sulungnya tersebut dan dianggapnya bahwa tindakan

yang dilakukan Paku Buwono II tersebut akan menjadi sumber malapetaka bagi keraton nantinya.

Sikap dan pendirian Paku Buwono II yang sangat mudah terpengaruh dan berubah-ubah serta ambisi dan peran Patih Danureja yang menjadi semakin sering untuk mencampuri permasalahan para bangsawan keraton, sehingga menyebabkan ketidak stabilan perpolitikan di keraton terus menerus jatuh. Hingga akhirnya Paku Buwono II semakin tumbuh dewasa dan mengerti kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Patih Danureja yang telah melampaui batas.

Dalam tahapan dewasa Paku Buwono II, penggantian pejabat-pejabat penting keraton mulai dilakukan dengan mengganti para pejabat lama yang memiliki hubungan kedekatan dengan Patih Danureja. Pengangkatan Tumenggung Suradiningrat yang dilakukan oleh Paku Buwono II secara diam-diam tanpa sepengetahuan Patih Dalem telah mendapatkan kecaman keras dari para Patih Dalem dan masalah ini menjadi awal pertikaian Paku Buwono II dengan para Patih Dalem Keraton.

Pada tahun 1733, Paku Buwono II mengirimkan surat kepada Gubernur Jenderal di Batavia melalui wakil dari pemerintah kolonial yang ada di Kartasura, yaitu Frederik Julius Coyett dan surat tersebut berisikan bentuk permohonan kepada pemerintah kolonial untuk dapat segera membantu memisahkan diri dari para Patih Dalem yang bertikai dengannya. Tepat pada tanggal 9 Juli 1733 Patih Danureja ditangkap oleh pemerintah kolonial atas



3. Paku Buwono II diharuskan memerintahkan penebangan seluruh pohon kopi yang merupakan ekspor unggulan keraton dan juga melarang pertanian lada di wilayahnya.

Sebagaimana raja-raja sebelumnya, Paku Buwono II pula menyimpan rasa benci yang cukup mendalam terhadap pemerintah kolonial. Keterusikan harga dirinya sebagai seorang raja dikerenakan tekanan-tekanan yang terus menerus diberikan pemerintah kolonial kepadanya, ditambah dengan dukungan dari para bangsawan yang tidak menyukai sepak terjang pemerintah kolonial terhadap kedaulatan Mataram, semakin menambah ketidak simpatikannya kepada pemerintah kolonial. Hanya rasa gentar terhadap kekuatan militer pemerintah kolonial membuatnya untuk hanya dapat menyimpan rasa kebenciannya yang cukup mendalam dan menunggu hingga saat yang tepat untuk menyalurkan hasrat kebenciannya tersebut.

Pada tahun 1740 terjadilah pemberontakan Cina di Batavia akibat diperlakukannya peraturan mengenai pengenaan pajak dan pembatasan lingkup usaha serta perizinan tinggal di wilayah pemerintah kolonial bagi orang Cina yang dinilai sangat diskriminatif dan memberatkan. Pemberontakan tersebut meluas ke seluruh pelosok Jawa, orang-orang Cina yang terdesak di Batavia mulai mengundurkan diri ke pelosok pedalaman dan ke arah Jawa Timur.



Pengepungan Semarang ditambah dengan mengalirnya pasukan tambahan di pihak pemberontak yang dipimpin oleh Que Panjang dan dibantu oleh pasukan para pangeran Cirebon semakin membuat kedudukan pemerintah kolonial melemah. Bandar Rembang pun ikut dikepung dan akhirnya jatuh ke tangan pemberontak pada tanggal 27 Juli di tahun yang sama. Pada tanggal 31 Juli di tahun yang sama pula, Jepara terkepung, namun dapat terselamatkan atas bantuan gerak cepat pasukan Pangeran Cakraningrat penguasa Madura, namun bantuan tersebut tanpa seizin Susuhunan.

Keterlibatan susuhunan semakin terlihat dengan adanya orang-orang Jawa bersenjata yang menggabungkan diri dengan para pemberontak. Sementara itu kondisi di sekitar Keraton Kartasura telah ada Kapten Johannes Van Velsen yang merupakan komandan pemerintah kolonial yang terkenal kejam mencoba melakukan maneuver politik dengan usahanya untuk mengganti susuhunan yang menurutnya telah terlibat terlalu jauh dengan pemberontakan orang Cina dengan salah seorang putera dari Susuhunan Hamangkurat III yaitu Pangeran Hangabei atau Pangeran Tepasana. Pada tanggal 1 Agustus 1741 pasukan pemberontak Cian mulai berdatangan ke Kartasura dan pada tanggal 5 Agustus 1741 dimulainya duel artileri antara meriam pemerintah kolonial yang sudah siap di Benteng Kartasura. Tanggal 10 Agustus di tahun yang sama, pasukan keraton melakukan penyerangan ke benteng pemerintah kolonial hingga akhirnya Van Velsen pun terbunuh dan sisa-sisa prajurit pemerintah kolonial yang masih hidup



kekuatan militer pemerintah kolonial kemudian memutuskan untuk berbalik haluan.

Pada Januari 1742, Paku Buwono II mengajukan permohonan penempatan kembali pasukan pemerintah kolonial di Loji Kartasura. Namun sikap Paku Buwono II ini mendapat kecaman keras dari para pangeran dan bangsawan serta para petinggi keraton yang sangat tidak menyetujui perubahan sikap Paku Buwono II tersebut kepada pemerintah kolonial. Sementara itu di belahan Timur, Pasukan Cakraningrat terus bererak maju menumpas habis setiap gerombolan pemberontak dan berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Pada tanggal 6 April 1742, salah seorang pemimpin pemberontak di dukung oleh Martapura dan Patih Natakusuma dan menobatkan Raden Mas Garendi menjadi raja dengan gelar Susuhunan Hamangkurat V.

Penobatan Raden Mas Garendi disambut dengan dukungan para bupati dan bangsawan yang sangat kecewa dengan sikap Paku Buwono II. Gerakan pasukan Sunan Hamangkurat V menuju Kartasura dan membuat kekhawatiran Paku Buwono II dan kemudian Paku Buwono II segera mengharapkan bantuan dari pemerintah kolonial maupun Cakraningrat. Verijsel, perwakilan dari pemerintah kolonial menyanggupi permintaan bantuan tersebut namun dengan mengajukan tuntutan untuk diserahkannya Pangeran Adipati Anom, Pangeran Ngabehi Loring Pasar dan putera sulung Patih Natakusuma beserta Raden Harya Pringgalaya sebagai jaminannya. Pada tanggal 17 Juni 1742, Patih Natakusuma





Surabaya, Sunan Kuning menyerahkan diri karena posisi pemberontak yang semakin melemah. Setelah Paku Buwono II menerima kembali tahta Kartasura, pemerintah kolonial segera meminta penggantian biaya perang dan juga dalam bantuannya mengembalikan tahta Kartasura kepadanya. Tuntutan tersebut disetujui oleh Paku Buwono II dan tertulis dalam perjanjian pada tahun 1743 yang memuat beberapa pasal berikut:

1. Penentuan, pengangkatan dan pemberhentian Patih Dalem harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah kolonial.
2. Seluruh daerah pantai utara Jawa dengan kota-kota pentingnya, terkecuali Semarang, diserahkan kepada pemerintah kolonial.

Dengan adanya perjanjian tersebut, hubungan Kartasura dengan daerah-daerah di seberang lautan terhambat. Satu-satunya pilihan untuk mempertahankan Kartasura adalah dengan menjual seluruh hasil produksinya kepada pemerintah kolonial karena keraton sudah tidak lagi memiliki akses ke laut. Selain itu, kemampuan di bidang perdagangan maupun armada laut dan seluruh pelabuhan telah dikuasai oleh pemerintah kolonial. Dalam bidang pemerintahan, pemerintah kolonial pun semakin menjadi dalam keterlibatannya untuk menentukan Patih Dalem yang merupakan pelaksana roda pemerintahan keraton.

Perjanjian tersebut mendapatkan banyak tantangan dari para bangsawan keraton. Paku Buwono II yang telah duduk kembali di singgasana keraton harus menerima kenyataan bahwa kondisi keraton telah melemah. Penyerbuan dan

kependudukan oleh barisan pemberontak telah merubah wajah dan tatanan keraton Kartasura yang telah menjadi pusat pemerintahan sejak tahun 1680. Untuk itu Paku Buwono II segera memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan Keraton Kartasura.

Sunan Paku Buwono II mengirim utusan yang terdiri dari ahli negara, pujangga dan ahli kebatinan untuk mencari tempat yang cocok bagi pembangunan keraton baru ke daerah sekitar Lembah Bengawan Solo tersebut. Para utusan tersebut diberi wewenang dan kekuasaan untuk bersama-sama mencari dan memilih tempat yang cocok untuk keraton baru nantinya, baik secara lahiriah maupun batiniah. Utusan tersebut adalah:

1. Patih Pringgalaya
2. Adipati Sindurejo
3. Kyai Hanggawangsa
4. Raden Tumenggung Mangkuyuda
5. Raden Tumenggung Puspanegara

Setelah berjalan lama, mereka mendapatkan tiga tempat yang dianggap cocok untuk dibangun keraton. Ketiga tempat tersebut adalah Desa Kadipala, Desa Solo, dan Desa Sana Sewu. Sesudah diadakan permusyawaratan panjang dengan seluruh utusan, Abdi Dalem dan Paku Buwono II, akhirnya mereka memutuskan untuk membangun keraton di Desa Solo di tepi Bengawan Solo dan keraton tersebut dinamai Keraton Surakarta Hadiningrat. Pembangunan tersebut tepat pada hari Rabu Pahing, 17 Sura Tahun Je 1670 atau 1745 Masehi.